

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang diperoleh dari DIPENDA Kabupaten Klaten, MAPATDA serta Teori Struktur Pengendalian Intern dan hasil wawancara langsung dengan nara sumber, maka sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan Kabupaten Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintahan di Kabupaten Klaten sampai saat ini sudah efektif sesuai dengan rencana kerja, untuk itu kemampuan kerja pemerintahan daerah dalam pengelolaan pasar akan sangat menentukan besarnya retribusi pasar yang diterima serta target yang dibuat oleh pemerintah daerah yang didasarkan atas penilaian potensi penerimaan retribusi pasar. Strategi yang digunakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan retribusi pasar dengan strategi yang digunakan yaitu dengan cara ditarget, jadi masing-masing pasar ditarget karena sesuai dengan potensinya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga diharapkan dengan strategi tersebut (target) pendapatan yang akan dicapai pada akhir Tahun sudah jelas dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan atau anggaran kegiatan pada tahun tersebut.

Disamping hal tersebut dengan cara ditarget kemampuan pendapatan atas realisasi pendapatannya dalam 1(satu) tahun anggaran

tersebut bisa jadi tolok ukur untuk menentukan target pendapatan pada tahun yang akan datang. Selain hal tersebut dengan strategi tadi, target adalah merupakan pedoman dasar kerja dalam melakukan pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Klaten dan tidak sembarangan memungut retribusi begitu saja, dan juga dengan cara tersebut bisa untuk membaca atau melihat kinerja para UPTD dalam menjalankan tugas-tugasnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pasar di kabupaten Klaten pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. faktor-faktor pendukung kinerja pemerintah dalam pemungutan retribusi pasar

1) Sumber daya manusia merupakan indikator yang sangat penting.

Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan program ini bisa berjalan dengan baik dengan adanya SDM yang baik juga. Dinas pengelolaan pasar sebagai pejabat pelaksana harus memiliki sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk melaksanakan programnya. Dengan adanya diklat bagi pejabat pelaksana ini bisa juga untuk lebih meningkatkan SDM dari pejabat pelaksana untuk melaksanakan program tersebut. Diklat yang diberikan pejabat pelaksana oleh Dinas Pengelolaan Pasar ini berasal dari Badan pemerintah Daerah. Jadi Dinas Pengelolaan Pasar hanya mengirimkan personilnya untuk mengikuti diklat ini.

- 2) Dana merupakan sarana pendukung utama dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan kawasan pasar yang pada setiap tahunnya dibutuhkan. Dana dalam melaksanakan program pengembangan pengelolaan pasar ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Klaten setiap pelaksanaan program membutuhkan dana yang cukup besar.
- 3) Nilai Sejarah Pasar Kabupaten Klaten wajar saja mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah kabupaten Klaten. Karena pasar delanggu dan pasar 3 tingkat dan pasar yang lainnya merupakan pasar yang terbesar diklaten dan dipergunakan untuk para pedagang untuk memperjual belikan barang, dan masyarakat berbelanja dipasar tradisional tersebut.

b. Faktor-faktor yang menghambat program kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pasar

- 1) Sarana dan prasarana pengembangan pasar yang belum optimal karena minimnya sarana dan prasarana yang ada, hal ini masih banyaknya lahan dasaran yang belum terisi yang bisa meningkatkan retribusi pendapatan pasar kabupaten klaten.
- 2) Keamanan Dan Ketertiban Situasi keamanan dan ketertiban yang belum kondusif. Hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus pencopetan khususnya dipasar delanggu dan pasar 3 tingkat dan pasar lain-lainya diklaten.

- 3) Tidak sesuai kebijakan pada perkembangan pasar saat ini, hal ini karena kurangnya regulasi teknis yang dapat menjadi dasar hukum untuk mengambil keputusan.

B. Saran

1. Diharapkan agar Dinas Pendapatan Kabupaten Klaten segera menetapkan sistem dan prosedur yang ada dalam MAPATDA sepenuhnya dengan tetap melakukan target penerimaan pajak.
2. Untuk mendukung kemandirian daerah dan meningkatkan PADS, bila memungkinkan sebaiknya dioperasikan komputer dalam keseluruhan kegiatan di Dipenda baik pendaftaran dan pendataan, penetapan maupun penyeterannya.
3. Diharapkan agar Dinas Pendapatan lebih sering melakukan pemeriksaan kepada pengusaha pajak khususnya Wajib Pajak Badan supaya tidak terjadi penyelewengan dalam membayar pajak.
4. Dalam melaksanakan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah semua kegiatan harus dilaksanakan seefektif dan seefisien